

Bea Cukai Magelang Cegah Kerugian Negara



KR-Zaini Arrosyid

Sosialisasi penanggulangan cukai ilegal di Temanggung.

TEMANGGUNG (KR) - Bea Cukai Magelang mengklaim berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara hingga miliaran rupiah karena peredaran rokok dan minuman keras ilegal tanpa cukai resmi. Keberhasilan ini karena Bea Cukai Magelang rajin menggelar razia rokok ilegal dan minuman keras ilegal, yakni rokok dan minuman keras yang tidak berpi-ta cukai resmi dari negara.

Kepala Bagian Umum Bea Cukai Magelang, Andriana Wurika mengatakan hal itu di sela sosialisasi rokok ilegal di Temanggung, Rabu (20/7).

Menurutnya, dalam beberapa kali operasi sejak Januari hingga Juli 2022, ditemukan ribuan rokok ilegal. Jika dihitung, Bea Cukai Magelang telah mengamankan potensi kerugian negara hingga ratusan juta rupiah.

Rokok ilegal, lanjut Andriana, selain merugikan negara juga berbahaya karena tidak ada pengawasan kadar komposisi nikotin, tar atau unsur lainnya. Dia berharap TNI, Polri, pemerintah dan masyarakat semakin erat bekerja sama dalam sosialisasi dan pemberantasan cukai ilegal.

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Pemkab Temanggung, Joko Prasetyono mengatakan pihaknya bersama Bea Cukai berkomitmen untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Langkah itu, di antaranya dilakukan dengan menggalakkan sosialisasi, intensif edukasi dan penelusuran informasi, serta menggelar operasi pasar yang melibatkan ormas, Polri dan TNI.

"Potensi penggunaan cukai ilegal di Temanggung pasti tetap ada. Karena itu perluantisipasi. Jika ditemukan, harus segera ditangani," tandasnya. **(Osy)**

SUKOHARJO KEMBANGKAN GAMELAN
Sekolah Perlu Ekstrakurikuler Karawitan

SUKOHARJO (KR) - Pemkab Sukoharjo mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sukoharjo memberikan ekstrakurikuler (ekskul) karawitan di sekolah.

Pihak sekolah bisa menyediakan gamelan untuk kebutuhan tersebut sesuai kemampuan. Keberadaan gamelan sangat penting menjadi ikon Kabupaten Sukoharjo sebagai Kabupaten Gamelan.

"Gamelan sudah diakui sebagai warisan budaya bangsa yang harus terus dilestarikan. Sedangkan Kabupaten Sukoharjo menjadi sentra pembuatan gamelan baik untuk Indonesia maupun negara lain. Gamelan tersebut dihasilkan oleh para perajin di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban," kata Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Jumat (22/7). Rabu (20/7) lalu, Etik Suryani juga membuka festival gamelan bertajuk *Sukoharjo Sound of Gamelan* di Pendapa

Graha Satya Praja (GSP)

Menurutnya, upaya pelestarian musik gamelan harus terus dilestarikan dan dikembangkan, baik dari sisi budaya, generasi penerus maupun perajin.

Salah satu upaya tersebut dilakukan Pemkab Sukoharjo dengan mendorong Disdikbud Sukoharjo memberikan ekstrakurikuler musik gamelan (Karawitan) di sekolah.

"Ekstrakurikuler karawitan akan berdampak pada regenerasi seniman karawitan. Di sisi lain, usaha kerajinan gamelan di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban juga bisa terus berkelanjutan," ungkap Etik.

Karena itu, diharapkan ekstrakurikuler karawitan diberikan mulai Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Untuk itu Pemkab Sukoharjo minta Disdikbud segera mempersiapkan ekstrakurikuler karawitan, dimulai dengan menyusun

kurikulum dan rencana anggaran untuk pengadaan gamelan sesuai kemampuan masing-masing sekolah.

Etik Suryani juga mengingatkan, gamelan resmi ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak

Benda Dunia atau *Intangible Culture Heritage* pada 15 Desember 2021 oleh UNESCO. Ini berarti bahwa gamelan menjadi produk unik dari budaya bangsa Indonesia yang tidak bisa ditemukan di belahan dunia manapun. **(Mam)**



KR-Wahyu Imam Ibadi

Bupati membuka 'Sukoharjo Sound of Gamelan' di Pendapa GSP.

DI KABUPATEN KARANGANYAR
1.273 Warga Dapat BLT dari DBHCHT

KARANGANYAR (KR) - Bantuan langsung tunai (BLT) bersumber dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Karanganyar menysasar 1.273 warga.

Mereka dari kalangan buruh pabrik rokok dan petani tembakau. Pencairan dana secara cash dan carry di lokasi pabrik dan kawasan kebun tembakau. Tiap penerima berhak Rp 300.000, jatah Juni-September 2022.

Bupati Karanganyar Juliyatmono mengharapkan BLT berasal dari sektor penerimaan cukai dan tembakau mampu meringankan beban buruh pabrik dan petani tembakau. "Dari cukai dan tembakau, ya kembalinya untuk mereka, buruh pabrik rokok dan petani tembakau," tandasnya.

Menurutnya, penerimaan Pemkab Karanganyar dari sektor cu-

kai dan tembakau tahun lalu Rp 15,7 miliar. Pemkab Karanganyar terus mengintensifkan operasi rokok ilegal untuk meningkatkan penerimaan cukai dan tembakau.

"Kami juga mengimbau produsen rokok untuk mengurus izin produksi. Jangan sampai memproduksi rokok ilegal yang dampaknya merugikan konsumen maupun produsen itu sendiri," tegas Juliyatmono.

Kabid Pemberdayaan dan Pembinaan Dinas Sosial (Dinsos) Karanganyar, Gunarto mengatakan penerima BLT tersebut ada 2.440 calon penerima. Kriteria calon penerima adalah buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau.

Di Karanganyar sendiri, berdasarkan data Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagakerkop dan UKM), jumlah sasaran buruh

pabrik rokok ada sebanyak 726 orang. Mereka buruh pabrik yang berstatus kependudukan Karanganyar.

Sementara itu, data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan (Dispertan PP) menunjukkan, buruh tani tembakau ada 547 orang, sehingga total penerima BLT ada 1.273 orang.

"Masing-masing menerima empat kali BLT untuk bulan Juni, Juli, Agustus dan September. Dibayarkan dua bulan sekali," jelas Gunarto, Selasa (19/7).

Disebutkan, Kabupaten Karanganyar saat ini menerima Rp 3,142 miliar. Calon penerima BLT dari enam pabrik rokok dan petani atau buruh ladang tembakau di Colomadu, Jatiyoso, Jenawi, Ngargoyoso dan Jumapolo. Pembagian BLT untuk buruh pabrik dilakukan dengan cara jemput bo-

la, sedangkan untuk petani di titik-titik pembayaran virtual akun.

Menurut Gunarto, direncanakan calon penerima BLT cukai rokok dan tembakau akan diperluas. Tidak hanya buruh dan petani tetapi juga warga tidak mampu di sekitar pabrik rokok atau masyarakat penderita tubercolosis (TBC). Namun penetapan kriteria tersebut masih menunggu keputusan Bupati Karanganyar.

"Saat ini, kriteria penerima BLT DBHCHT sesuai SK Bupati, adalah buruh pabrik rokok ber-KTP luar Karanganyar maupun buruh pabrik rokok asal Karanganyar namun bekerja di luar daerah, akan menerima BLT cukai tembakau dari Provinsi Jawa Tengah," ungkapnya. **(Lim)**

HUKUM

2 ORANG TEWAS DAN BELASAN LUKA-LUKA
Diduga Rem Blong, Pickup Terjun ke Jurang

BREBES (KR) - Sedikitnya dua orang tewas dan belasan luka-luka, setelah mobil pickup yang mereka tumpangi terjun ke jurang di ruas Jalan Pengebatan-Karangpari Kecamatan Bantarkawung, Kamis (21/7). Hingga kemarin, para korban luka masih dirawat di rumah sakit terdekat.

Korban tewas masing masing supir pickup yakni Farihin (34) dan satu penumpang, Tarsumi (65).

Sedangkan belasan korba luka-luka dirawat di RS Bantarkawung dan RS Bumiayu Brebes. "Kami masih mendata nama-nama korban yang terluka," ujar petugas Polsek Bumiayu.

Kapos Gakkum Bumiayu, Aiptu Adi Bagus Setiawan, membenarkan peristiwa tersebut. Hingga kini pihaknya masih melakukan pendataan terhadap para korban luka. Kecelakaan tunggal itu terjadi sekitar pukul 06.40.

"Mobil itu membawa kurang

lebih 28 orang penumpang dewasa dan anak anak," ujar Babinsa Koramil 12/Bantarkawung, Serma Sukarjo.

Dari keterangan para saksi, kejadian tersebut terjadi di jalur arah Desa Karangpari menuju Desa Pengebatan. Mobil itu membawa puluhan penumpang untuk menghadiri acara hajatan.

"Saat di lokasi kejadian tepatnya di komplek Demang Sakti Desa Pengebatan, rem mobil mengalami trouble," tutur Sukarjo.

Akibat rem yang mengalami trouble, kendaraan tidak terkendali. Apalagi, kondisi jalan yang menurun dan menikung, sehingga mobil akhirnya masuk jurang sedalam 100 meter.

"Dua orang meninggal dan puluhan korban luka-luka dievakuasi daan dirawat di Puskesmas Buaran, Bantarkawung dan di RSUD Bumiayu," tegas Sukarjo. **(Ryd)**

DUGAAN PENYIMPANGAN KREDIT BANK JOGJA

Kejati Beri Sinyal Bakal Ada Tersangka Baru

YOGYA (KR) - Kejaksanaan Tinggi (Kejati) DIY masih terus mengembangkan kasus dugaan penyimpangan kredit Bank Jogja. Setidaknya Kejati DIY telah memberi sinyal akan ada pembahan tersangka baru dalam perkara yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 27,4 miliar tersebut.

"Kemungkinan akan ada tersangka baru dan jumlahnya bisa lebih dari satu orang. Tapi untuk kepastiannya tunggu dulu. Kalau sudah pasti, akan kami segera umumkan," ungkap Kajati DIY, Katharina Endang Sarwestri SH MH, didampingi Wakajati DIY Dr Rudi Margono SH MHum usai upacara Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-62 di Stadion Mandala Krida, Jumat (22/7).

Dijelaskan, pengembangan perkara ini merupakan hasil dari penyidikan terhadap tersangka TS (mantan regional business PT Transvision Jateng-DIY) dan anak buahnya AK. Penyidik sekarang ini

masih menelusuri larinya uang hasil kejahatan para tersangka.

"Kami menduga uang hasil korupsi tidak hanya dinikmati sendiri oleh tersangka. Saat ini sedang kami dalam," tegasnya.

Sedangkan kinerja lainnya, dalam rangka pencegahan penyimpangan, Kejati melalui bidang Datun telah melaksanakan suluh praja ke 392 kalurahan di DIY. Dari hasil penyuluhan tersebut, sudah banyak kalurahan yang minta pendampingan dari kejaksaan.

"Suluh praja ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan di kalurahan-kalura-

han. Kami ingin kejaksaan ini menjadi mitra dari kalurahan," paparnya.

Di samping itu, Kejati DIY juga melakukan penyuluhan hukum di beberapa pondok pesantren wilayah DIY. Tujuannya untuk menghindari pelecehan seksual di kalangan

pondok pesantren.

"Kami juga masuk ke pondok pesantren untuk memberikan penyuluhan hukum. Hal ini sebagai bentuk pencegahan terjadinya tindak pidana seperti kasus pelecehan seksual maupun kasus lainnya," tuturnya. **(Sni)**



KR-Saifullah Nur Ichwan

Kajati DIY memberikan potongan tumpeng kepada Wakajati DIY dalam rangka puncak acara HBA ke-62.

KORBAN MELAPOR KE POLDA DIY

Oknum Advokat Diduga Palsukan Salinan Putusan

SLEMAN (KR) - Diduga melakukan penipuan dan pemalsuan dalam salinan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Wates seorang oknum advokat inisial TDH dilaporkan ke Polda DIY. Laporan dilayangkan oleh Elina Diassafira warga Kalurahan Karangsewu Kapanewon Galur Kabupaten Kulonprogo.

Selain dugaan pemalsuan surat pelapor yang didampingi tim pengacaranya dari Kantor Hukum HR Associates, terdiri Refingo Krishna SH Andyamond SH, Rifqi Triputro, Hariyanto SH dan Cahyo Irawan SH, juga melaporkan dugaan penipuan dalam jabatan yang mengakibatkan korban menderita kerugian mencapai lebih dari Rp 170 juta.



KR-Istimewa

Hariato SH beserta anggota tim kuasa hukum menunjukkan bukti laporan polisi.

"Yang bersangkutan sudah kami laporkan ke Polda DIY dengan bukti nomor laporan polisi LP/B/0578/VII/2022/SPKT/Polda DIY pada tanggal 17 Juli 2022. Menurut informasi dari penyidik dalam waktu dekat akan dilakukan penganggilan saksi-saksi," jelas Hariyanto sambil menunjukan sura bukti lapor, Kamis (21/7).

Diungkapkan, laporan ini dilakukan lantaran kliennya merasa ditipu oleh oknum advokat yang menawarkan jasa pendampingan hukum dengan total biaya mencapai Rp 170 juta. Namun belakangan diketahui pula bahwa di dalam salinan amar putusan terdapat ke-janggalan diduga dipalsukan oleh terlapor.

"Awalnya korban atau klien kami terjerat masalah hukum, lalu terlapor berupaya menawarkan jasa pendampingan hukum dan menjanjikan bahwa putusan nanti di bawah tiga bulan. Terlapor mengatakan pokoknya dengan saya beres. Klien kami yang tidak paham hukum percaya saja padanya, sehingga mengikuti proses itu. Mintanya Rp 170 juta, sebanyak Rp 20 juta katanya untuk honor dan yang Rp 150 juta untuk biaya-biaya yang dia bisa menjanjikan akan tembus (vonis) di bawah tiga bulan," ungkapnya.

Awalnya tim kuasa hukum terdiri dari 4 orang, namun sebanyak 3 orang menyatakan mengundurkan diri sehingga uang sebanyak Rp 170 juta dikembalikan kepada korban.

"Begitu mundur dan uang dikembalikan, oknum ini datang lagi dengan posisi maubuk datang ke tempat klien kami. Dia langsung bilang, mana uangnya? saya selesaikan semuanya dan bilang kalau ti-

dak dikasih saat itu juga nanti hukumannya tinggi. Padahal waktu itu sudah dicabut kuasanya. Dengan bujuk rayu maka klien kami tergiur maka diserahkan uang sebanyak Rp 120 juta. Ternyata saat dua kali mendampingi di Pengadilan diduga tidak ada surat kuasa, tapi kok bisa, jangan-jangan surat kuasanya dipalsu kan kita tidak tahu juga," ungkap Hariyanto.

Akhirnya korban divonis pidana penjara selama 3 bulan dan 15 hari oleh majelis hakim dan sudah dijalani. Ketika menjalani penahanan, kemudian terlapor mendatangi kantor kalurahan setempat untuk memberikan salinan putusan kepada Lurah Karangsewu kemudian diteruskan ke Kantor Kecamatan. "Saat di Kantor Kecamatan ditolak karena tidak dibubuhi cap atau stempel, lalu dikembalikan ke Lurah selanjutnya diberikan kepada oknum. Lalu oknum tersebut kembali ke Lurah dan saat sampai di Kecamatan diketahui ada ke-janggalan karena ada dugaan stempel tidak identik dengan aslinya," tegasnya.

Setelah menjalani pidana penjara, korban bebas dan menerima surat dari Lapas selama 3 bulan dan 15 hari. Sehingga mulai terkuak dugaan aksi penipuan dan pemalsuan dalam salinan putusan. "Nah saat keluar dari penjara, baru tahu bahwa hukumannya 3 bulan 15 hari dan klien kami meminta salinan putusan yang asli di Pengadilan ternyata ada perbedaan, kita laporkan dengan Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 264 KUHP," tuturnya. **(Zie)-f**